

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Studi Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim. Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup merupakan kejahatan yang berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan dan kualitas hidup masyarakat, sehingga penegakan hukumnya harus dilakukan secara optimal melalui mekanisme peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup serta menilai penerapan ketentuan hukum pidana lingkungan dalam Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim, Putusan Nomor 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN, dan Putusan Nomor 4398 K/Pid.Sus-LH/2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta ketiga putusan pengadilan tersebut. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi disparitas pertimbangan hakim pada tiga tingkat peradilan. Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana karena unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut dan menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan adanya sengketa perdata terkait hak atas tanah. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari jaksa dengan pertimbangan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi. Perbedaan putusan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan hukum pidana lingkungan dan kecenderungan pergeseran penanganan perkara lingkungan dari ranah pidana ke perdata yang berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan lingkungan hidup. Kesimpulan penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan konsistensi pertimbangan hakim dan penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan konsistensi penerapan hukum pidana lingkungan dan kepada pembuat kebijakan untuk memperkuat pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana Lingkungan

ABSTRACT

Description of Environmental Pollution Criminal Acts:A Study of Decision Number 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim.Environmental pollution criminal acts are crimes that directly impact environmental sustainability and the quality of community life, thus law enforcement must be carried out optimally through the criminal justice mechanism. This study aims to describe and analyze the judges' considerations in rendering decisions on environmental pollution criminal acts and to assess the application of environmental criminal law provisions in Decision Number 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim, Decision Number 1820/PID.SUS-LH/2024/PT MDN, and Decision Number 4398 K/Pid.Sus-LH/2025.This study employs normative legal research methods with statutory and case approaches. The type of research is descriptive qualitative. The legal materials used include primary legal materials in the form of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, and the three court decisions mentioned above. Secondary legal materials consist of books, journals, and opinions of legal experts. Data collection techniques are carried out through document study.The results of the study indicate that there is a disparity in judicial considerations at the three levels of judiciary. The District Court imposed a criminal sentence because all elements of the crime were fulfilled. The High Court overturned the decision and acquitted the defendant on the grounds of a civil dispute regarding land rights. The Supreme Court rejected the prosecutor's cassation appeal on the grounds that there was no error in the application of law by the High Court. This difference in decisions shows an inconsistency in the application of environmental criminal law and a tendency to shift the handling of environmental cases from the criminal domain to the civil domain, which has the potential to weaken the function of criminal law as a means of environmental protection. The conclusion of this study is that criminal law enforcement against environmental pollution criminal acts still faces problems of consistency in judicial considerations and the application of environmental law principles. It is recommended that law enforcement officials improve the consistency of applying environmental criminal law and that policymakers strengthen regulations on criminal liability in environmental pollution criminal acts.

Keywords: Environmental pollution criminal act, judicial consideration, court decision, environmental criminal